

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

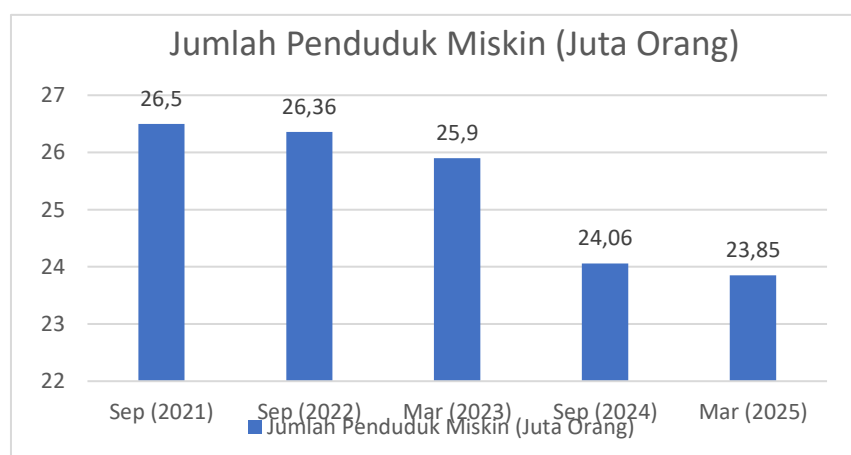
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Selain itu, kemiskinan merupakan masalah sosial-ekonomi yang melintas batas etnis, agama, dan kebangsaan (Mansur, 2024). Konsep garis kemiskinan yaitu jumlah uang minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan. Garis kemiskinan mencakup kebutuhan non-pangan seperti perumahan, kesehatan, dan pendidikan serta kebutuhan pangan yang setara dengan 2.100 kalori per orang per hari. Seseorang dianggap miskin jika rata-rata pengeluaran bulanan per kapita mereka berada di bawah ambang batas ini (Badan Pusat Statistik, 2025a).

Pemerintah berupaya untuk mengatasi kemiskinan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Regulasi ini mengatur upaya terpadu dan berkelanjutan melalui kebijakan dan program pemberdayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara (Undang Undang Republik Indonesia, 2011). Selanjutnya Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (2014) kemiskinan diakui sebagai masalah nasional yang serius yang memerlukan penanganan yang menyeluruh dan terkoordinasi.

Upaya untuk mengatasi kemiskinan ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membantu mewujudkan *United Nations* melalui agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)* terutama tujuan pertama *No Poverty* atau tanpa kemiskinan (Nawir, 2022). Dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses terhadap layanan yang diperlukan, dan memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, tujuan ini menekankan betapa pentingnya mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia (Zulyanto, 2022).

Selama beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Indonesia terus menurun. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan melalui berbagai program dan peraturan yang telah diterapkan. Namun, masih menyisakan banyak tantangan dan penurunan ini belum terlalu signifikan. Data di bawah ini menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

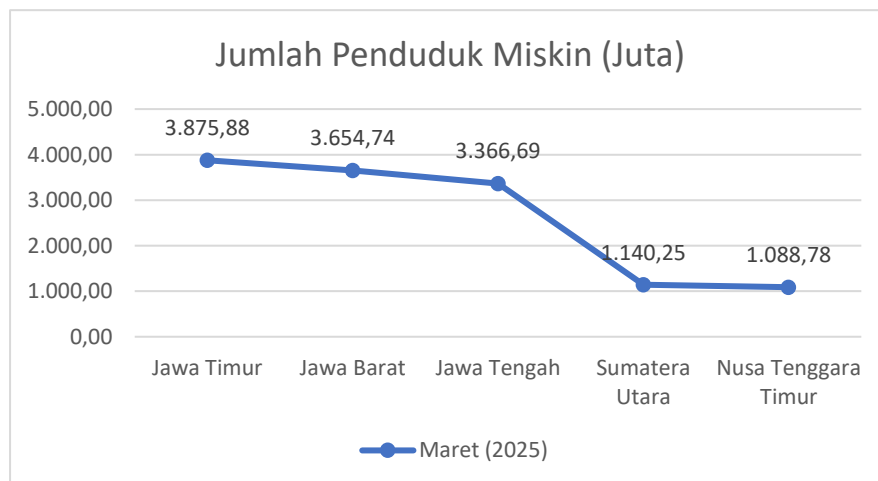


Sumber: Badan Pusat Statistik 2025 Profil Kemiskinan di Indonesia

Meskipun tingkat kemiskinan baru-baru ini mengalami penurunan, jutaan warga Indonesia masih hidup dalam kemiskinan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas. Menurut laporan (Badan Pusat Statistik, 2025b) sebanyak 23,85 juta warga Indonesia hidup dalam kemiskinan per Maret 2025. Dibandingkan dengan angka 24,06 juta jiwa yang dilaporkan pada September 2024, angka ini lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah serius yang memerlukan solusi jangka panjang.

Tingkat kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia masih bervariasi, dengan beberapa provinsi memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah di banyak daerah dan masih tersebar secara tidak merata. Berikut merupakan data provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling banyak.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025 Profil Kemiskinan di Jawa Timur

Berdasarkan laporan (Badan Pusat Statistik, 2025c) di atas, hingga Maret 2025 lebih dari 3,876 juta orang di Provinsi Jawa Timur hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang menuntut berbagai tindakan dari

pemerintah daerah bukan hanya dari pemerintah pusat saja, meskipun data ini menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menjalankan beberapa program bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 mengatur salah satu program tersebut (Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur, 2019). Aturan ini menguraikan tujuan strategi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan program bantuan sosial tambahan seperti PKH Plus, yang berfokus pada lansia dari rumah tangga berpenghasilan rendah (Kharima & Nawangsari, 2024).

Selain itu, penyaluran bantuan sosial melibatkan sejumlah pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah serta instansi terkait lainnya. Masalah-masalah umum dalam proses ini antara lain alokasi dana yang tidak akurat, kurangnya integrasi data, dan kerja sama antarlembaga yang kurang memadai. Kondisi-kondisi tersebut telah menghalangi mereka yang membutuhkan untuk merasakan manfaat penuh dari bantuan sosial ini seperti kutipan dari sumber berita online berikut ini

”Persoalan data bantuan sosial juga mencuat dalam reses yang diadakan pada 12 Februari 2026. Warga menyampaikan bahwa pembaruan data di tingkat bawah sering kali tidak tersinkron ke pusat, sehingga bantuan dinilai tidak tepat sasaran. Anggota Komisi C DPRD Jatim menjelaskan bahwa data dari daerah sebenarnya sudah diperbarui, namun tidak selalu terakomodasi di tingkat pusat. Ia menilai perlu ada perbaikan mekanisme agar pemerintah pusat lebih melibatkan struktur pemerintahan paling bawah” (Anwar, 2026)

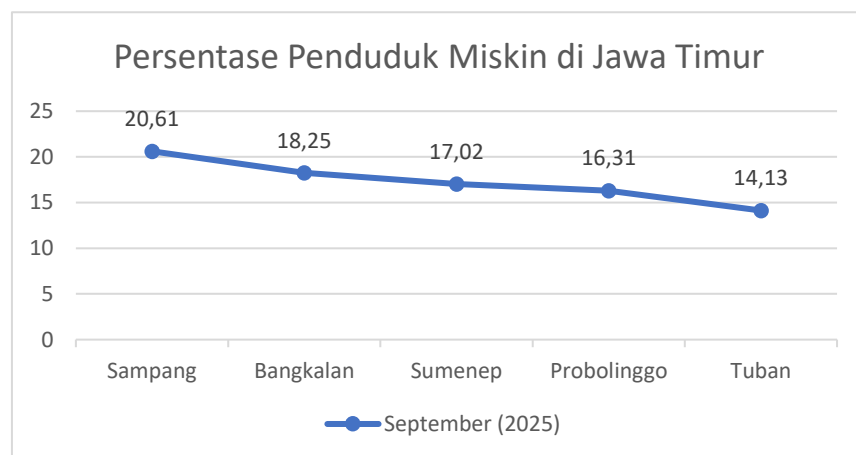
Sumber:

<https://madiun.jatimtimes.com/baca/3331338163/20260212/124700/reses-di-surabaya-lilik-dprd-jatim-soroti-pelanggaran-umk-hingga-bansos-tak-tepat>

[sasaran#:~:text=Persoalan%20data%20bantuan%20sosial%20juga%20me
ncuat%20dalam,pusat,%20sehingga%20bantuan%20dinilai%20tidak%20t
epat%20sasaran](#) Diakses pada tanggal 12 Maret 2026.

Kabupaten Bangkalan yang saat ini memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur dan bahkan dianggap sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua (Yahya, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan beberapa upaya, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut belum mengalami penurunan yang signifikan (Zallianty, 2025). Berikut disajikan data persentase penduduk miskin se-Jawa Timur berdasarkan Kabupaten tahun 2025.

Tabel 1.3 Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur

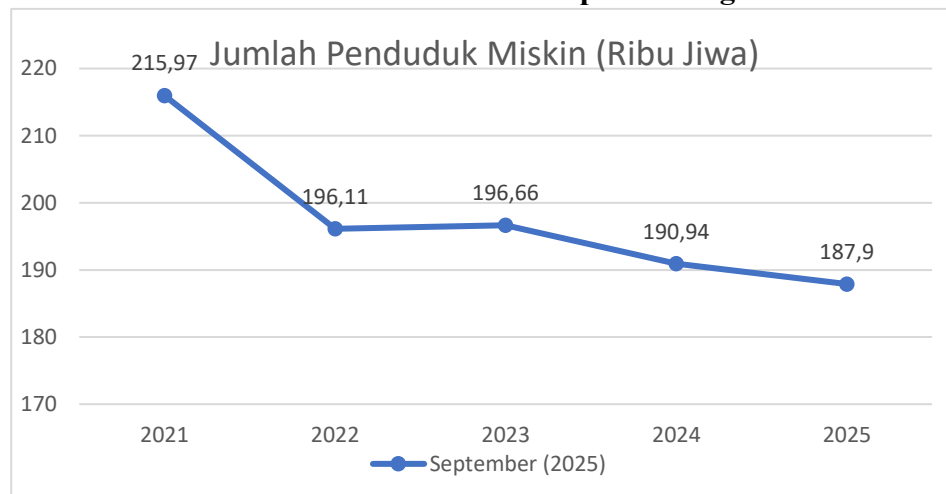


Sumber: Badan Pusat Statistik 2025 Profil Kemiskinan di Jawa Timur

Berdasarkan data dalam tabel, Kabupaten Bangkalan memiliki tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Provinsi Jawa Timur dengan 18,25%. Meskipun bukan yang tertinggi, angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Bangkalan masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini menandakan bahwa masih banyak penduduk yang belum mampu terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya dan hidup di bawah garis kemiskinan.

Selama lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan telah mengalami perubahan yang signifikan (Tobari, 2023). Terlihat jelas dari data pada tabel di bawah ini bahwa proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan terus mengalami penurunan. Tren penurunan ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan mulai menunjukkan hasil yang positif, baik melalui program bantuan sosial maupun intervensi kebijakan lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025 Profil Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan

Meskipun terjadi penurunan selama lima tahun terakhir, Kabupaten Bangkalan masih menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2025d) Kabupaten Bangkalan pada tahun 2025 memiliki jumlah penduduk 187,90 ribu jiwa yang tergolong cukup tinggi. Masyarakat di daerah tersebut masih sangat membutuhkan program bantuan sosial untuk mengentas kemiskinan sebagaimana ditunjukkan oleh kondisi ini (Wahyudi, 2025).

Penyaluran bantuan yang tidak efektif merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang masih menghambat penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bangkalan. Akibatnya, kelompok masyarakat yang paling rentan tidak menerima bantuan sosial tersebut (Pratiwi, 2022). Sejumlah kasus di mana data tersebut salah input data dan tidak dilengkapi dengan nomor identitas yang lengkap turut menyebabkan rendahnya kualitas data kesejahteraan sosial (Hidayat & Fanida, 2025). Bapak Mohammad Aminullah selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menyatakan sebagai berikut

”Masih ada beberapa kendala dalam penyaluran bantuan sosial seperti masih ada data warga yang belum terinput ke sistem, juga masih banyak yang protes kenapa kok ga dapat bantuan jadi dari pihak dinsos perlu memverifikasi ulang. Paling banyak terkait tahun lalu dapat tapi ternyata di DTSEN desil sudah berubah jadi tidak urgent untuk mendapatkan bantuan” (Hasil wawancara pra penelitian 27 Februari 2026)

Program Keluarga Harapan Plus yang merupakan program komplementer dari program PKH reguler yang dikelola oleh pemerintah pusat, merupakan salah satu inisiatif bantuan sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan. Program PKH sebagai bantuan sosial bersyarat dari pemerintah pusat berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan aspek pendidikan dan kesehatan (Asmaul Chusna, 2025a). Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan program PKH Plus yang secara khusus menyasar lansia dengan pendekatan bantuan yang tidak bersyarat dan lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (Aliza et al., 2024). Berikut merupakan tabel perbandingan PKH Reguler dan PKH Plus.

Tabel 1.5 Perbandingan PKH Reguler dan PKH Plus

No.	Aspek	PKH Reguler	PKH Plus
1.	Tujuan Program	Meningkatkan taraf hidup keluarga miskin melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	Menurunkan biaya hidup dan meningkatkan pendapatan para lansia, memperluas akses mereka terhadap layanan kesehatan, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan memberikan bantuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka, seperti makanan dan perawatan medis.
2.	Sasaran Program	Ibu hamil, balita, anak sekolah (SD-SMA), lansia, dan penyandang disabilitas	Lansia minimal 70 tahun dan telah terdaftar dalam PKH Reguler
3.	Sumber Anggaran	APBN 1. Ibu hamil: Rp. 3.000.000/4 tahap 2. Anak Usia Dini (0-6 Tahun): Rp. 3.000.000/4 tahap 3. SD: Rp. 900.000/4 tahap 4. SMP: Rp. 1.500.000/4 tahap 5. SMA: Rp. 2.000.000/4 tahap 6. Lansia: Rp. 2.400.000/4 tahap 7. Disabilitas berat: Rp. 2.400.000/4 tahap	APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 2.000.000 / 4 tahap pencairan
4.	Kewajiban Penerima	1. Ibu hamil pemeriksaan kesehatan 2. Balita imunisasi 3. Anak sekolah harus hadir di sekolah	Ada posyandu lansia selebihnya tidak bersyarat seperti PKH reguler, lebih ke pemanfaatan bantuan

		4. Lansia mengikuti layanan kegiatan sosial 5. Penyandang disabilitas berat wajib dirawat dan diperiksa kesehatannya secara rutin	untuk kebutuhan lansia seperti penggunaan dana untuk menunjang kesehatan dan kebutuhan pokok lansia agar lebih sejahtera
5.	Pendampingan	Pendamping PKH (SDM PKH Kemensos) yang rutin monitoring: 1. Wajib mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) 2. Pemutakhiran data 3. Wajib menggunakan dana bantuan untuk keperluan yang jelas	Pendamping PKH + Dinsos yang melakukan verifikasi, monitoring, dan pendampingan sebagai berikut: 1. Verifikasi lansia penerima 2. Pendampingan saat pencairan 3. Monitoring kondisi lansia

Sumber: Pedoman Pelaksana PKH dan Pedoman Umum PKH Plus Provinsi Jawa Timur yang diolah oleh penulis (2026)

Perbedaan utama antara PKH reguler dan PKH Plus tidak hanya terletak pada sumber anggaran dan sasaran penerima. Penerima PKH reguler wajib memenuhi komitmen tertentu seperti kehadiran sekolah dan pemeriksaan kesehatan (Triyono & Kartika, 2022). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang (Asmaul Chusna, 2025b). Sebaliknya, PKH Plus bersifat bantuan tambahan yang lebih fleksibel tanpa kewajiban ketat karena menyasar kelompok lansia yang secara fisik memiliki keterbatasan (Harmonis & Malik, 2024). Oleh karena itu, indikator keberhasilannya lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar lansia.

PKH Plus adalah bantuan sosial tambahan yang diberikan kepada lansia atau keluarga yang menerima manfaat PKH reguler serta dikategorikan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (Brianita & Prathama, 2024). Tujuan PKH Plus adalah

untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, memberikan akses ke layanan kesehatan, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan memberikan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari lansia, seperti makanan dan perawatan medis (Kharima & Nawangsari, 2024).

Bantuan ini diperuntukkan bagi lansia berusia 70 tahun ke atas yang memenuhi persyaratan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk keluarga miskin (Nabillah et al., 2023). Program ini tercantum pada RENSTRA 2019-2024 Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan RENSTRA 2019-2024 Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan termasuk salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki kuota penerima PKH Plus terbesar, hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan akan bantuan sosial di wilayah tersebut serta banyaknya jumlah lansia yang hidup dalam kemiskinan. Berikut disajikan data terkait jumlah penerima bantuan sosial PKH Plus.

Tabel 1.6 Jumlah Penerima Bantuan Sosial PKH Plus Berdasarkan Kabupaten Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Kuota Tersalurkan	Anggaran
1.	Bangkalan	3.458	1.761.000.000
2.	Probolinggo	3.411	1.705.000.000
3.	Sumenep	3.055	1.545.000.000
4.	Lamongan	2.796	1.419.500.000
5.	Sampang	2.664	1.348.000.000

Sumber: Sapa Bansos.go.id yang diolah oleh penulis (2026)

Berdasarkan data pada tabel di atas, Kabupaten Bangkalan memiliki jumlah penerima PKH Plus terbanyak di Jawa Timur dengan 3.458 kuota tersalurkan dengan anggaran Rp. 1.761.000.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa Bangkalan memiliki jumlah lansia yang hidup dalam kemiskinan yang relatif tinggi. Program

seperti PKH Plus sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut karena jumlah penerima manfaat yang cukup besar dan tingkat kemiskinan Bangkalan yang secara konsisten tinggi.

Kabupaten Bangkalan juga menerapkan terkait dengan data kemiskinan dan bantuan sosial melalui Sidaya Sehati yang merupakan sistem informasi dan aplikasi berbasis teknologi informasi yang disusun untuk mendukung tugas dan fungsi SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) dalam melakukan pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Bangkalan yang telah dilakukan mulai tahun 2021. Namun, sesuai dengan tujuan pemerintah untuk memiliki sistem data terintegrasi yang disimpan dalam satu basis data tunggal, tidak boleh ada data kemiskinan tambahan yang tersimpan di luar basis data pusat. Sehingga, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 tentang DTSEN (Instruksi Presiden Republik Indonesia, 2025), pemerintah mewajibkan penggunaan Basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan data kemiskinan.

Penyaluran Program Keluarga Harapan Plus tidak terlepas dari peran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial (Sugianto, 2025). Program Keluarga Harapan Plus di tingkat daerah melibatkan berbagai instansi yang memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan (Meylani et al., 2026). Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai pembuat kebijakan sekaligus koordinator dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Selanjutnya, Dinas Sosial Kabupaten melakukan verifikasi lanjutan melalui *ground checking* serta memanfaatkan data tersebut untuk

menetapkan sasaran penerima bantuan sosial dan merencanakan program kesejahteraan di daerah (Meidiana & Helmi, 2024).

Peran koordinator kabupaten bersama dengan pendamping pkh plus dalam pelaksanaan program PKH yaitu dengan mengoordinasikan proses verifikasi dan validasi data antar wilayah, serta memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan (Aliza et al., 2024). Koordinator kabupaten bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta sinkronisasi data yang berasal dari tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan (Khairurizqi, 2026). Selain itu, koordinator kabupaten juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan para pelaksana di lapangan dalam hal pelaporan, evaluasi, dan perbaikan data. Sementara itu, pendamping PKH bertugas memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil keluarga penerima, melakukan pemutakhiran data apabila terjadi perubahan status sosial ekonomi, serta mengidentifikasi masyarakat yang layak namun belum terdaftar (Demplon, 2025).

Terdapat penelitian terdahulu oleh Hibatullah et al., (2023) yang berjudul "*Pendekatan Whole Of Government Dalam Pelayanan Publik Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Whole of Government* di Kabupaten Batang telah mampu mendorong terciptanya koordinasi lintas lembaga, integrasi layanan, serta peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, seperti adanya ego sektoral antar instansi, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi dalam aspek teknis tertentu. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Whole of Government* oleh

Suwarno & Sejati (2017) yaitu Penguatan Koordinasi Antar Lembaga, Membentuk Lembaga Kooordinasi Khusus, Membentuk Gugus Tugas, dan Koalisi Sosial.

Penelitian terdahulu oleh Retnaningsih et al., (2024) yang berjudul "*Narrative Literature Review: Penelitian tentang Efektivitas Program Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*" yang menganalisis mengenai efektivitas program bantuan sosial bagi keluarga miskin di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program bantuan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perencanaan program, ketepatan sasaran penerima bantuan, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat. Namun, penelitian tersebut juga menemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan bantuan sosial, seperti data penerima yang tidak akurat, keterlambatan penyaluran bantuan, serta lemahnya monitoring dan evaluasi program.

Relevansi penelitian ini dapat dilihat dari kesamaan permasalahan yang ditemukan pada penelitian terdahulu yang membahas mengenai program bantuan sosial. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa penyaluran bantuan sosial PKH Plus sangat bergantung pada akurasi data yang bersumber dari DTSEN. Proses pendataan, verifikasi, hingga penetapan penerima bantuan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja melainkan memerlukan kolaborasi dan integrasi lintas sektor. Hal ini memperkuat relevansi penggunaan pendekatan *Whole of Government*, khususnya untuk menganalisis bagaimana koordinasi antar lembaga dalam penyaluran bantuan sosial dapat berjalan secara tepat dengan 4 pendekatan *Whole of Government* oleh

Suwarno & Sejati (2017) dalam (Achmadi & Hariadi, 2020) yaitu Penguatan Koordinasi Antar Lembaga dan Koalisi Sosial.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, Kabupaten Bangkalan dipilih sebagai lokus penelitian karena tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Meskipun berada pada posisi kedua, Bangkalan justru menempati posisi pertama dalam jumlah penerima PKH Plus dari data yang telah disajikan sebelumnya. Kondisi ini menarik, karena menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat kemiskinan dan distribusi bantuan sosial yang diterima. Hal ini yang membuat Bangkalan menarik untuk diteliti lebih lanjut agar bisa dipahami bagaimana kondisi tersebut terjadi di lapangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul **“Analisis *Whole of Government* dalam Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Plus di Kabupaten Bangkalan”** dengan tujuan menganalisis bagaimana berbagai instansi berkolaborasi dan terintegrasi dalam memastikan bantuan sosial dapat tersalurkan sehingga tepat sasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah ”Bagaimana Analisis *Whole of Government* dalam Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Plus di Kabupaten Bangkalan?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis *Whole of Government* dalam Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Plus di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan konsep *Whole of Government* dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang koordinasi antar lembaga dalam penyaluran bantuan sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan penulis mengenai konsep *Whole of Government* serta implementasinya dalam penyaluran bantuan sosial di daerah. Penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam konteks nyata khususnya dalam bidang administrasi publik.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan dalam meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan Plus di Kabupaten Bangkalan. Selain itu, hasil penelitian

ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam memperkuat koordinasi, integrasi kebijakan, serta kolaborasi antar perangkat daerah yang terlibat, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

3. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan pendekatan *Whole of Government* dalam penyaluran bantuan sosial sehingga dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar lembaga.